

INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Irma Rachmayani¹, Arizka Warganegara²

Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia^{1,2}

E-mail: irmarachmayani5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, metode ini menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung dengan jalan mengumpulkan, memahami alur peristiwa secara kronologis, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Belum teraktualisasikannya institusional partai PDIP dilihat melalui dominasi pemimpin partai yaitu Megawati Soekarnoputri. Dan masih kentalnya dominasi elit politik dalam melahirkan kader instan. 2). Tidak jelasnya ideologi yang hampir berimbang terhadap ketiadaan ikatan yang kuat antara partai politik, Hampir tidak ada perbedaan menonjol dalam hal garis ideologi antara satu partai politik dengan partai politik lain. Akibat dari hal tersebut pemilih terlampau mudah untuk berpindah-pindah pilihan dalam setiap pemilu sesuai dengan dinamika sosial politik saat itu. 3). Tingkat partisipasi pemilih (voters turn out) yang terus mengalami penurunan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Dan 4). tantangan lain PDIP adalah persepsi publik, hingga saat ini PDIP dapat dinilai sebagai partai yang masih lemah, Ini menunjukkan betapa masih lemahnya ideologi yang dibangun partai. Citra PDIP sebagai partainya “wong cilik”.

Kata Kunci: *Institusionalisasi Partai Politik, Partai Politik, PDIP*

ABSTRACT

This study aims to analyze the institutionalization process of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). This study was designed using a descriptive qualitative research method. This method describes the research object based on existing and ongoing facts by collecting, understanding the chronological flow of events, and explaining the data obtained to then be analyzed according to existing theory. The research results show that: 1). The institutionalization of the PDIP party has not yet been actualized, seen through the domination of the party leader, namely Megawati Soekarnoputri. And the dominance of the political elite is still strong in giving birth to instant cadres. 2). The lack of clear ideology almost results in the absence of strong ties between political parties. There is almost no notable difference in terms of ideological lines between one political

party and another. As a result of this, it was too easy for voters to move between their choices in each election according to the socio-political dynamics of the time. 3). The turnout rate of voters (voters turn out) continues to decline in every election. And 4). Another challenge for PDIP is public perception, until now PDIP can be assessed as a party that is still weak. This shows how weak the ideology that the party has built is still weak. The image of PDIP as the party is "little people".

Keywords: *Institutionalization of Political Parties, Political Parties, PDIP*

PENDAHULUAN

Partai politik hadir sebagai salah satu upaya perwujudan negara ke arah yang lebih demokratis, karena warga negaranya dapat berpartisipasi langsung dalam mengelola kehidupan berbangsa maupun bernegara. Partai politik merupakan sekumpulan orang di dalam organisasi politik yang sama dan memiliki asas, tujuan, dan visi-misi yang sama untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam sistem politik Indonesia partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokrasi (Miriam, 2008)

Keberadaan partai politik dihadapkan pada kondisi paradoks, dimana tingkat kepercayaan publik terus menurun seakan menjadi tren dikalangan masyarakat. Jika dibandingkan dengan awal reformasi tingkat kepercayaan publik (terhadap parpol) saat itu relatif tinggi, namun belakangan justru hasil survei menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik kepada partai politik. Berdasarkan hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai

politik rendah, dari 12 institusi partai politik berada dibawah dengan tingkat kepercayaan sebesar 54% (Kompas.com 03/04/2022)

Hal ini menjadi hal yang kontradiktif jika melihat sejarah lahirnya partai politik sebagai wadah perwujudan demokrasi. Secara umum, tumbuhnya rasa tidak percaya dan sikap skeptis publik pada partai politik sebagaimana tergambar dalam beberapa kasus yang terjadi yang melibatkan aktivis partai, konflik internal yang gaduh di banyak pemberitaan, performa partai yang masih jauh dari harapan, dan pelembagaan partai yang jalan di tempat adalah beberapa masalah yang masih menghinggapai partai politik di Indonesia hingga saat ini. Padahal partai politik dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, tidak ada demokrasi tanpa partai politik.

Kualitas partai politik berelasi kuat dengan proses pelembagaan, dalam konteks ini upaya untuk meninjau proses pelembagaan partai politik merupakan bagian dari upaya memastikan demokrasi diisi oleh partai politik yang berkualitas (Randall dan Lars, 2002). Huntington mengatakan

(Pamungkas, 2011) pelebagaan merupakan proses dimana organisasi dan prosedur memperoleh kestabilan. Atau dalam pengertian Randall dan Lars (2002), pelebagaan diartikan sebagai proses dimana partai menjadi stabil (mantap) dalam hal pola perilaku yang terintegrasi maupun dalam hal sikap (*attitude*) dan budaya.

Tidak hanya persoalan pelebagaan partai politik yang perlu diatur dengan sedemikian baik tetapi partai pula harus mampu mengikuti perubahan-perubahan pada sistem politik agar tetap mampu berkompetisi partai politik harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, agar dapat bertahan dan meraih dukungan ataupun simpati yang besar dari masyarakat (Romli, 2008).

Saat ini terus bermunculannya aktivis-aktivis partai politik koruptif. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir beberapa ketua parpol mendekam dipenjara. Selain itu, dalam isu korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) menjerat sebagian besar elite politik yang didakwa terlibat kasus tersebut, sistem kaderisasi internal partai yang masih menggunakan patronase ketokohan semata. Beberapa parpol yang saat ini memiliki perwakilan di parlemen misalnya ketua umumnya sudah beberapa periode tidak tergantikan, paling bergeser ke ketua Dewan Pembina. Artinya, regenerasi kaderisasi kepemimpinan di parpol tersebut tidak berjalan. Dan, bukan

hanya satu-dua parpol, beberapa parpol di Indonesia mengandalkan figuritas ketokohan semata, sistem internal parpol yang masih feodal yakni pucuk pimpinan partai dikuasai oleh keluarga.

Berdasarkan hasil latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk menganalisa secara mendalam terkait, “Institusionalisasi Partai Politik (tudi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP))”.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pelebagaan Partai Politik

Terkait dengan masalah pelebagaan partai politik, Vicky Randall dan Lars Svasand (2002) mencoba memberikan penjelasan tentang pelebagaan partai. Pelebagaan partai politik merupakan proses penetapan partai politik baik secara struktural dalam rangka. Mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap maupun budaya. (*the process by which the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture*)” (Ridha, 2016). Proses pelebagaan ini dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila kedua aspek ini dipersilangkan maka akan menghasilkan sebuah tabel empat sel yaitu :

1. Derajat kesisteman (*systemnes*), sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural.
2. Derajat identitas nilai (*value infusion*), suatu partai sebagai

hasil persilangan aspek internal dengan kultural.

3. Derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*), sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural.

4. Derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*), sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan kultural (Ridha, 2016).

Pertama, Derajat Kesisteman atau systemness merupakan proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai politik dalam AD dan ART partai politik.

Kedua, Derajat Identitas Nilai, berkaitan dengan ideologi atau platform partai, berdasarkan basis sosial pendukungnya dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai tersebut. Derajat identitas nilai suatu partai berkaitan dengan hubungan partai dengan kelompok populis (*popular group*) tertentu, apakah suatu partai mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung kelompok populis tertentu, baik berdasarkan kelas maupun komunitas agama atau etnik tertentu. Selain itu, derajat identitas nilai (Romli, 2008).

Ketiga, Derajat Otonomi. Derajat otonomi lebih menekankan aspek relasi antara partai dengan aktor di luar partai, baik sumber otoritas seperti

penguasa maupun pemerintah, atau sumber dana misalnya, pengusaha, penguasa, negara, atau lembaga luar lainnya serta sumber dukungan massa seperti organisasi masyarakat.

Hal yang terpenting dalam dimensi ini adalah: Pertama, apakah partai tergantung pada aktor luar tersebut. Kedua, apakah keputusan partai turut ditentukan oleh aktor luar. Idealnya, partai politik tersebut melembaga apabila semua keputusan partai yang dibuat partai terbebas dari intervensi pihak luar (Wahid, 2018).

Keempat, Derajat reifikasi atau derajat pengetahuan publik tentang partai politik yang merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik ? (Susanto, 2018). Keberadaan partai politik merupakan aspek yang penting dalam pendekatan terhadap masyarakat dan apabila pengetahuan publik terhadap partai politik sudah tercapai maka publik akan menyesuaikan aspirasi dan harapan maupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut (Prattama, 2015).

Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu acuan yang terdapat di dalam masyarakat atau negara yang menganut sistem demokrasi. Seiring dengan berkembangnya sistem demokrasi pada saat ini, partai politik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem demokrasi karena ikut serta dalam kegiatan politik. Partai politik merupakan salah satu manifestasi dari

sebuah adanya kebebasan yang diberikan oleh negara yaitu kebebasan untuk berserikat dan berkumpul (Wiraraja, 2012).

Menurut Carl J. Friedrich, mengemukakan bahwa : “Partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*)”.

Sementara menurut Sigmund Neumann, menyebutkan bahwa : “Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent view*)” (Miriam, 2008)

Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik itu dibentuk secara umum, *pertama*, sebagai sarana komunikasi politik yaitu untuk memperbincangkan dan menyebarkan rencana - rencana dan kebijakan - kebijakan pemerintah. Partai politik berperan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Dimana partai politik mengagregasikan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi yang berasal dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan (Natalia, 2015).

Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

Ketiga, rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dari partai politiklah diharapkan ada proses kaderisasi pemimpin-pemimpin ataupun individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan jabatan yang mereka pegang. (Prasetya, 2011).

Keempat sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*). Partai politik diharapkan menjadi sarana

pengatur konflik yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat selalu ada dan dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam praktek politik sering dilihat bahwa fungsi-fungsi yang telah disebutkan tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan (Ramlan, 2000. Dalam kutipan Jondar, 2018).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan mengelompokkan data yang bersifat kualitatif, Metode ini menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung dengan jalan mengumpulkan, memahami alur peristiwa secara kronologis, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai teori yang ada. Kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada penelitian ini dan tidak menggunakan kuantitas angka-angka statistik. Menurut Moleong (2017) Metodologi penelitian kualitatif merupakan metode yang dalam mengumpulkan data melalui cara yaitu: survey, pengamatan (observasi), dan penelaah dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Scott Mainwaring yang membagi 4 ciri pemikiran terkait institusionalisasi partai politik. Scott Mainwaring berpendapat bahwa institusionalisasi partai politik dapat

dilihat melalui 1) dominasi partai, 2) ideologi yang tidak jelas, 3) tingkat partisipasi pemilih, dan 4) persepsi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu penganut bentuk pemerintahan yang demokrasi, ide dasar yang mendorong demokrasi bahwa setiap warga memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan dengan harapan dapat mengubah kehidupan mereka. Demokrasi juga menghendaki dibentuknya partai politik sebagai sarana partisipasi rakyat dalam proses pengelolaan negara.

Indonesia pasca-Orde Baru mengalami perubahan dalam penerapan sistem politik, dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis. Penerapan sistem demokratis memberikan perubahan terhadap dinamika kehidupan politik, dalam hal kebebasan berekspresi dan berasosiasi untuk mendirikan dan membentuk partai politik.

Pada era Orde Baru berlaku sistem multipartai, namun di hegemoni satu partai. Pada masa Reformasi, kemudian kembali pada sistem multipartai tanpa hegemoni satu partai. Pada Era Reformasi menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan (kredibilitas) masyarakat terhadap partai politik secara masif. Hal ini disinyalir terjadi karena ketidakmampuan partai politik itu sendiri yang tidak mampu memainkan fungsinya secara optimal.

Melihat sejarah lahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai politik yang ada di Indonesia. Sejarah PDIP dapat dituntut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927. PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973. Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah.

PDIP merupakan salah satu partai besar ia memiliki *captive market* yang luas yaitu pengagum Sukarno, juga kelompok minoritas yang jumlahnya sekitar 13% dari total penduduk. Beberapa pendapat mengatakan baseline suara PDIP minimal 14%. PDIP juga merupakan partai penguasa, tentunya ia dayagunakan posisinya di pemerintahan untuk membesarkan partai. Dalam proses perjalanannya PDIP sudah membangun sistem politik yang baik, baik dari sisi struktur partai, proses pengkaderan, proses kerja, hingga pendanaan partai. PDIP sangat menyadari bahwa partai politik memiliki fungsi penting yang sangat ideal. Namun disadari pula masih ada gap antara fungsi ideal dan praktik di lapangan.

Tidak dapat dipungkiri kualitas tata kelola partai politik masih

terbilang sangat rendah, hal itu dapat dilihat dari belum teraktualisasikannya empat dimensi institusionalisasi partai politik. Sebagaimana diungkapkan Scott Mainwaring, ciri pertama dari belum kuatnya institusionalisasi partai politik adalah dominasi personal dari seorang elite politik. Dalam konteks politik Indonesia hal ini dapat dilihat dari dominasi personal seorang tokoh di internal partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki ketergantungan tinggi terhadap sosok Megawati Soekarnoputri, dominasi ini yang membuat warna kepemimpinan PDIP tetap sama. Puan yang keturunan Mega dan menjadi ketua DPR dinilai belum menjadi simbol pemersatu. Perihal lain pada pemilihan Walikota Solo dan Medan pada 2020 lalu ini menggambarkan bagaimana secara terbuka PDIP membangun hubungan dinasti politik dengan mencalonkan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dan Bobby Afif Nasution yang merupakan menantu presiden RI sekaligus kader PDIP, kehadiran 2 tokoh ini tidak hanya menggambarkan politik yang dilahirkan secara instan hal ini juga menunjukkan adanya dominasi elit politik.

Ideologi partai politik di Indonesia yang cenderung tidak jelas juga menjadi ciri kedua dari ketiadaan ikatan kuat terhadap partai politik di tingkat akar rumput. Hampir tidak ada perbedaan menonjol dalam hal garis ideologi antara satu partai

politik dengan partai politik lain. Akibat dari hal tersebut pemilih terlampau mudah untuk berpindah-pindah pilihan dalam setiap pemilu sesuai dengan dinamika sosial politik saat itu. Dari pemilu legislatif tahun 1999 hingga pemilu legislatif tahun 2004, PDIP mengalami penurunan perolehan suara 15,5%.

Ciri ketiga institusionalisasi partai politik berupa adanya pengakuan dari elite dan warga negara bahwa partai politik merupakan hal penting dan mendasar bagi kehidupan demokrasi. Dalam konteks politik Indonesia mutakhir hal itu mulai terlihat rapuh. Jika di masa-masa awal reformasi publik sangat menaruh ekspektasi tinggi terhadap partai politik sebagai harapan bagi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju arah lebih baik, tetapi publik justru merasa sangat kecewa terhadap kinerja partai politik. Tingkat partisipasi pemilih (*voters turn out*) yang terus mengalami penurunan dalam setiap pelaksanaan pemilu.

Selain ketiga hal tersebut tantangan lain PDIP adalah persepsi publik, hingga saat ini PDIP dapat dinilai sebagai partai yang masih lemah, Ini menunjukkan betapa masih lemahnya ideologi yang dibangun partai. Citra PDIP sebagai partainya "*wong cilik*", seketika sudah terbantahkan dengan melihat aksi Puan Maharani mematikan mic di saat rapat pengesahan Undang-Undang cipta kerja yang saat itu disinyalir adanya

ketidak berpihaknya pemerintah kepada masyarakat.

Faktor utama yang menyebabkan hal itu terjadi adalah partai politik tidak mampu memainkan fungsinya secara optimal sebagai organisasi profesional. Institusi partai politik cenderung terjebak hanya mengejar kepentingan sendiri dan golongannya, kemudian melupakan keberadaan hakikatnya dalam sistem politik. Untuk itu, dibutuhkan kerangka institusionalisasi partai politik sebagai acuan menciptakan sistem politik yang lebih demokratis.

Pertama, partai politik harus membangun kekuatan institusi yang demokratis, bukan membangun kekuatan ketokohan personal atau bintang politik. Apabila masih mengandalkan figur belaka, bila figur itu rusak, rusak juga seluruh institusi partai tersebut sehingga peran kaderisasi dalam partai politik sungguh vital. Menghidupkan sistem rekrutmen internal yang terstruktur dan menggunakan sistem merit. Partai politik memilih kader terbaik dari tingkat ranting, kecamatan untuk menjadi calon pemimpin yang akan diusung pada pemilu maupun pilkada ke depan

Kedua, partai politik harus memiliki integritas internal yang kuat. Dengan memiliki kekuatan internal yang memiliki integritas, kebijakan yang kemudian diterapkan keluar akan memiliki kualitas yang baik karena lahir dari sistem integritas internal yang baik.

Ketiga, Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) harus mendukung partai politik untuk membentuk jadi dirinya sehingga partai tidak mengandalkan kekuatan uang (*money politic*) dan tawaran kekuasaan sebagai senjata utama meminta dukungan. Membentuk jadi diri parpol lambat laun dapat mengikis parpol yang hanya mengandalkan uang.

Keempat, negara bisa hadir membiayai partai politik. Tujuannya agar partai bisa bekerja secara efisien tanpa terbebani oleh pendana swasta. Namun, pendanaan parpol oleh APBN ini harus dipertanggungjawabkan dan harus terbuka untuk umum pelaksanaannya.

Kerangka institusionalisasi partai politik di atas diharapkan menjadikan partai politik di Indonesia menjadi lebih profesional dan kembali dipercaya oleh masyarakat. Hidupnya mesin internal partai politik diharapkan kelak dapat melahirkan banyak politisi negarawan. Dengan begitu, pada suatu titik Indonesia akan menuju tahap akhir proses transisi demokratisasi dan sudah sepenuhnya menjadi negara yang demokrasi Pancasila seutuhnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti dan pembahasan yang telah dijelaskan dan dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan pada institusional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai berikut :

1. Belum teraktualisasikannya institusional partai PDIP dilihat

melalui dominasi pemimpin partai yaitu Megawati Soekarnoputri. Perihal lain pada pemilihan Walikota Solo dan Medan pada 2020 lalu ini menggambarkan bagaimana secara terbuka PDIP membangun hubungan dinasti politik dengan mencalonkan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dan Bobby Afif Nasution yang merupakan menantu presiden RI sekaligus kader PDIP, kehadiran 2 tokoh ini tidak hanya menggambarkan politik yang dilahirkan secara instan hal ini juga menunjukkan adanya dominasi elit politik.

2. Tidak jelasnya ideologi yang hampir berimbang terhadap ketiadaan ikatan yang kuat antara partai politik, Hampir tidak ada perbedaan menonjol dalam hal garis ideologi antara satu partai politik dengan partai politik lain. Akibat dari hal tersebut pemilih terlampau mudah untuk berpindah-pindah pilihan dalam setiap pemilu sesuai dengan dinamika sosial politik saat itu.
3. Tingkat partisipasi pemilih (*voters turn out*) yang terus mengalami penurunan dalam setiap pelaksanaan pemilu.
4. Tantangan lain PDIP adalah persepsi publik, hingga saat ini PDIP dapat dinilai sebagai partai yang masih lemah, Ini menunjukkan betapa masih lemahnya ideologi yang dibangun partai. Citra PDIP sebagai partainya "*wong cilik*".

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Randall, Vicky dan Lars, Svasand. (2002). *Party Institutionalisation in New Democracies*. Party Politics
- Pamungkas, Sigit. (2011). *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism
- Romli, Lili, dkk. (2008). *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta : Puskapol Fisip UI.
- Ridha, M. (2016). *Dilema Pelembagaan Partai Di Tingkat Lokal : Fenomena Politik Klan*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1.
- Wahid, M. (2018). *Penguatan Pelembagaan Partai Politik Melalui Pilkada Serentak 2018 : Sebagai Upaya Melahirkan Elit Politik Yang Etis*. Jakarta : Konferensi Perkumpulan Dekan Ilmu Sosial Ptn Se Indonesia.
- Prattama, Y. D. (2015). *Pelembagaan Partai Nasional Demokrat : Studi Kasus Penguatan Elektoral Di Kabupaten Nganjuk*. Politik Muda.
- Wiraraja, A. (2012). *Pelembagaan Partai Politik (Studi Kasus : Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Demokrat di Kota Surabaya Tahun 2009)*. Politik Muda.
- Natalia, A. (2015). *Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015*. Tapis
- Pasaribu, P. (2017). *Peran Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*. *Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/19371471/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-partai-politik-rendah?page=all>